

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

KELOMPOK 4 :

Muhammad Jibril Ramadhan 2313031045

Nela Amelia 2313031050





Konsep dan Pengertian Anggaran Sektor Publik

Istilah anggaran berasal dari kata budget (bahasa Inggris) yang berakar dari kata bouvette (bahasa Prancis) yang berarti “sebuah tas kecil”. Dalam pengertian luas, anggaran mencakup keseluruhan proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dalam suatu periode. Sementara itu, dalam arti sempit, anggaran hanya merujuk pada rencana penerimaan dan pengeluaran dalam kurun waktu satu tahun. Penganggaran (budgeting) sendiri merupakan kegiatan mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk membiayai kebutuhan organisasi yang cenderung tidak terbatas.

Konsep dan Pengertian Anggaran Sektor Publik

Secara hakikat, anggaran adalah pernyataan tentang perkiraan kinerja yang hendak dicapai sebuah organisasi dalam jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan moneter. Dalam konteks sektor publik, anggaran berfungsi sebagai alat akuntabilitas untuk memastikan pengelolaan dana masyarakat dan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh dana publik berjalan dengan baik. Proses penganggaran menjadi krusial karena menyangkut penentuan alokasi dana bagi setiap program dan aktivitas.

Terdapat tiga aspek utama yang harus termuat dalam anggaran sektor publik, yaitu:

- 1) Perencanaan
- 2) Pengendalian
- 3) Akuntabilitas publik.



Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu :

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintahan.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Faktor yang dominan dalam proses penganggaran

- Tujuan dan target yang hendak dicapai.
- Ketersediaan sumber daya (faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah).
- Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target.
- Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti : munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan sebagainya.



Otorisasi oleh
legislative



Bersifat Periodik

Komprehensif

Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik

Keutuhan Anggaran

Nondiscretionary
Appropriation

Akurat

Kejelasan

Diketahui Publik

Fungsi Anggaran Sektor Publik

1. Anggaran sebagai Alat Perencanaan (Planning Tool)
2. Anggaran sebagai Alat Pengendalian (Control Tool)
3. Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal Tool)
4. Anggaran sebagai Alat Politik (Political Tool)
5. Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordination & Communication Tool)
6. Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja (Performance Measurement Tool)
7. Anggaran sebagai Alat Motivasi (Motivation Tool)

KESIMPULAN

Penganggaran sektor publik merupakan proses krusial dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan, pengendalian, serta akuntabilitas kepada masyarakat. Anggaran tidak hanya sekadar rencana penerimaan dan pengeluaran, tetapi juga instrumen kebijakan fiskal, politik, koordinasi, penilaian kinerja, dan motivasi bagi aparatur pemerintahan. Proses penyusunan anggaran memerlukan perencanaan yang matang, meliputi penetapan tujuan, prioritas program, serta pemilihan sumber pendanaan dengan mempertimbangkan faktor ketersediaan sumber daya, waktu, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Penyusunan anggaran sektor publik wajib berlandaskan prinsip-prinsip utama seperti otorisasi legislatif, komprehensivitas, keutuhan anggaran, ketepatan perkiraan, kejelasan, periodisasi, dan keterbukaan publik. Penerapan prinsip tersebut menjamin efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas penggunaan dana publik. Dengan demikian, anggaran sektor publik bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi sarana strategis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang terencana, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.



STUDI KASUS

Pemerintah Indonesia merencanakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dengan biaya sekitar 466 triliun rupiah. Tujuannya adalah mengurangi beban Jakarta serta mendorong pemerataan pembangunan.

Namun, proyek ini menimbulkan perdebatan. Pertama, transparansi penggunaan anggaran dipertanyakan karena skema pembiayaan dari APBN, BUMN, swasta, hingga investasi asing belum sepenuhnya jelas. Kedua, muncul dilema antara prioritas anggaran: apakah dana besar lebih tepat dipakai untuk IKN atau untuk sektor mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, masih ada kritik mengenai minimnya partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan, padahal sesuai prinsip anggaran publik seharusnya bersifat terbuka, akurat, dan dapat ditanggungjawabkan.

Pertanyaan :

1. Bagaimana fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian bisa diterapkan agar proyek IKN tidak boros?
2. Jika Anda anggota legislatif, apakah akan menyetujui alokasi dana besar untuk IKN di tengah kebutuhan lain yang mendesak?



Thank you
very much!